

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



RIZAL ALI NURDIN
NIM. 10675005165

PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Pada Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Sayarif
Kasim Riau*



RIZAL ALI NURDIN
NIM. 10675005165

PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH(PERDA) NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK

Oleh

Rizal Ali Nurdin

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Implemenatasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Terhadap pengusaha walet yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian bersifat kualitatif di mana data yang diperoleh dianalisa dan disajikan dalam bentuk tabel kemudian diberikan penjelasan dari setiap tabel selain itu setiap tabel dalam satu indikator di Rekapitulasi dalam sebuah tabel. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket yang disebar di lokasi penenelitian dengan jumlah populasi 792 pengusaha, sedangkan yang menjadi sampel sebanyak 263, sampel ini diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat error sebesar 5%. Implementasi Perda No 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, yang ditinjau dari pelaksanaan pendataan, penghitungan dan penetapan serta pemungutan dan pembayaran. Masih terdapatnya permasalahan-permasalahan yang sangat mempengaruhi berjalannya Implementasi Perda ini secara menyeluruh permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: (1) Masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan hasil panen kepada Dispenda saat melaksanakan panen maupun penjualan. (2) Masih banyak masyarakat yang kurang memahami isi perda ini sehingga kurang bertanggung jawab akibatnya banyak tunggakan yang belum dibayar. (3) Masih banyak sanksi yang di kenkan kepada wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak namun sanksi yang dibebankan tidak membuat jera para pengusaha. (4) Dispenda belum pernah mengadakan penyitaan terhadap wajib pajak yang enggan membayar pajak sampai batas waktu 5 tahun

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implemetasi Perda No 09 Tahun 2008 ini belum terlaksana secara menyeluruh (kurang maksimal).

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II : TELAAH PUSTAKA	
2.1.Pengertian Pemerintah	15
2.2.Kebijakan	17
2.3.Pengertian Pajak dan Pajak Sarang Burung Walet	24
2.4.Konsep Oprasional	33
2.5.Teknik Pengukuran	34
2.6.Variabel Penelitian	36
2.7. Hipotesis.....	37

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

3.1.Jenis Penelitian.....	38
3.2.Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.3.Jenis dan Sumber Data	38
3.4.Teknik Pengumpulan Data	39
3.5.Populasi dan Sampel	40
3.6.Teknik Analisis Data	41

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1.Sejarah dan Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hilir	42
4.2.Keberadaan Dinas pendapatan Kabupaten Indragiri hilir	45

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1.Identitas Responden	57
5.2.Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pajak Sarang Burung Walet	59

BAB VI : PENUTUP

6.1.Kesimpulan.....	87
6.2.Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah dengan esensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih terlaksana bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Otonomi juga memberi harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih terlaksana dan terciptanya iklim demokrasi di Daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan – kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka daripada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi dimasa yang lalu.

Otonomi Daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah.

Menurut Insukindro (dalam Faisal 2008 : 2) dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Di antara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah terlaksana dengan cara intensifikasi maupun dengan cara eksentisifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan / menggantungkan harapan pada Pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Di samping itu Pendapatan Asli Daerah juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama dan mempunyai arti yang sangat penting bagi daerah sebagai :

1. Biaya penyelenggaraan pemerintah
2. Biaya pembangunan dan biaya rutin daerah.

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana Perimbangan;
3. Pinjaman Daerah;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya bahwa dalam pembiayaan pembangunan memerlukan dana yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Dana yang digunakan untuk pembangunan itu didapat dari sumber penerimaan negara, pada umumnya penerimaan negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari :

1. Bumi, air dan kekayaan alam.
2. Pajak-pajak, Bea dan Cukai.
3. Penerimaan Negara, Bukan Pajak (non-tax)
4. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan

5. Sumber-sumber lain seperti : percetakan uang dan pinjaman.
(Bohari,2008:11)

Sementara itu dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dan salah satu sumber PAD yang dominan setelah retribusi daerah adalah pajak daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Salah satu daerah yang menggunakan pajak sebagai modal pembangunan dan menjalankan program pemerintah daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir, di mana pungutan yang termasuk dalam golongan pajak terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Pengambilan Hasil Laut & Budidaya Perikanan

9. Pajak Pendaftaran Perusahaan

10. Pajak Usaha Penyewaan Bangunan

Dari pemungutan pajak di atas, merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan pada seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga setiap Kecamatan dan Instansi akan memberikan peranan penting dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Kabupaten, maka dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan, daerah dituntut untuk menggali potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Salah satu potensi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan akan membantu pelaksanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah pengelolaan Sarang Burung Walet. Burung walet yang bersarang dipinggir-pinggir sungai, goa-goa alam/buatan, rumah-rumah penduduk dan di bangunan lainnya merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Potensi ini dinilai potensial di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun jumlah pengusaha burung walet yang ada di Kabupaten ini berjumlah 792 buah yang tersebar di 14 Kecamatan dari 20 kecamatan telah terdapat sejumlah penangkaran sarang burung walet, dengan jumlah yang ada pajak sarang burung walet dinilai memadai sebagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Indragiri Hilir yang hasilnya digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan juga sebagai pembiayaan Pembangunan Daerah. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat

dilihat jumlah penangkar sarang burung walet se-Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1. Jumlah Penangkar Sarang Burung Walet dan Realisasi Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Se-Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2009

No	Kecamatan	Jumlah Penangkar Sarang Burung Walet	Pembayaran pajak Berdasarkan Peraturan Daerah No 09 Tahun 2008
1	Kateman	244	106
2	Pulau Burung	14	10
3	Kuala Indragiri	54	45
4	Concong	50	29
5	Reteh	69	32
6	Keritang	18	11
7	Tanah Merah	48	40
8	Gaung Anak Serka	24	10
9	Gaung	30	29
10	Batang Tuaka	12	11
11	Mandah	17	16
12	Tembilahan Hulu	23	9
13	Tembilahan	186	136
14	Pelangiran	3	2
	Jumlah	792	468

Sumber : Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2010

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa potensi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang berasal dari penangkaran burung walet dinilai cukup potensial. Di mana setiap kecamatan yang ada, masing-masing memiliki penangkaran sarang burung walet. Hal ini akan menambah manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Namun demikian banyak pengusaha yang enggan membayar kewajiban pajak yang ditetapkan

Dalam melaksanakan pemungutan sarang burung walet ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah

(Peraturan Daerah) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Pada Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tersebut dijelaskan bahwa :

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas Sarang Burung Walet
- (2) Objek Pajak adalah pengambilan Sarang Burung Walet
- (3) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan dan atau mengambil Sarang Burung Walet
- (4) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melaksanakan pajak yang terhutang termasuk pungutan atau pemotongan Pajak tertentu.

Sementara itu dalam pengenaan tarif pajak diatur pada pasal 3 yang menjelaskan:

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual Sarang Burung Walet
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan banyaknya/besarnya Sarang Burung Walet yang dipanen dengan harga yang berlaku di pasaran sesuai dengan jenis masing-masing Sarang Burung Walet.

Pada pasal 4 menjelaskan bahwa :

Besarnya tarif Pajak ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan.

Salah satu dinas yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan retribusi dan pajak daerah adalah Dinas Pendapatan yang disingkat (Dipenda). Dipenda merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mempunyai kewenangan didalam mengkoordinir penerimaan daerah, sekaligus koordinator penerimaan daerah yang terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan penugasan kepada Dinas Pendapatan Kab. Inhil yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan Pembentukan Tim Pengawas Pengelolaan/pemanfaatan Sarang Burung Walet. Sehingga dari surat keputusan ini diberikan tugas kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk memungut pajak sarang burung walet tersebut.

Disamping itu dapat dilihat bahwa pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan sebanyak 10 (Sepuluh) bentuk pajak sementara pajak lainnya dilaksanakan pemungutannya oleh Dinas-Dinas yang memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di mana pada saat ini Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai 33 jenis Pajak dan Retribusi.

Dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang dilakukan dalam satu kali dalam setahun yang dilakukan oleh pengusaha burung walet, maka pihak

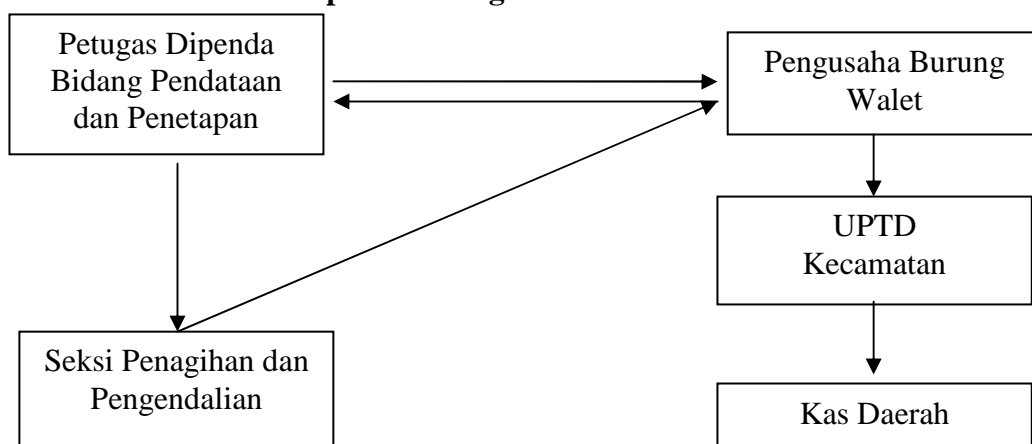
Dipenda melakukan koordinasi kepada pengusaha walet tentang hasil penjualan. Setelah data dikumpulkan melalui bidang pendataan dan penetapan kantor Dipenda mengeluarkan surat pembayaran pajak. Dalam penetapan pembayaran sarang burung walet dilakukan dengan cara :

$$\text{Hasil Panen} \times \text{Harga Pasaran umum} / 10 \%$$

Sedangkan dalam pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk dan dapat dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ada di setiap Kecamatan. Dalam pelaksanaan pembayaran, pihak pengelola burung walet diberikan batas waktu sampai tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Namun apabila pembayaran tersebut terlambat, maka akan dikenakan sanksi Administrasi (denda) sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat mekanisme pembayaran pajak dibawah ini :

Gambar I.1 Mekanisme Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Indragiri Hilir, 2010

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa mekanisme pemungutan pajak walet sebagai berikut :

1. Pegawai Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini pegawai pada Bidang Pendataan dan Penetapan melakukan pendataan terhadap hasil penjualan walet. Data hasil penjualan tersebut dikumpulkan dan diterbitkan surat ketetapan Pajak walet.
2. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diserahkan kepada seksi penagihan dan pengendalian untuk mengumpulkan dari pengusaha walet.
3. Setelah data pajak dikumpulkan, pegawai Dipenda dalam hal ini pegawai pada bidang penagihan dan pengendalian menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada pengusaha walet.
4. Pengusaha walet dapat menyetorkan dana ke UPTD Kecamatan dan dapat langsung membayarkan ke kas daerah.

Sehingga dari dasar di atas, pengusaha penangkar sarang burung walet diwajibkan untuk mengeluarkan pajak. Untuk melihat pendapatan yang dilihat dari target dan realisasi dalam pemungutan pajak sarang burung walet ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel I.2 Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dari Sektor Pajak Sarang Burung Walet.

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
1	2005	60.000.000,00	118.400.000,00	197,33
2	2006	100.750.000,00	185.665.000,00	184,28
3	2007	500.000.000,00	396.650.500,00	79,33
4	2008	500.000.000,00	540.000.000,00	104,97
5	2009	650.000.000,00	412.400.000,00	63,45

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Indragiri Hilir, 2010

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi yang diterima dari pajak sarang Burung Walet dinilai dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini dilihat dari pencapaian pada tahun 2005 mencapai 197,33 % dan tahun 2006 mencapai 184,28%, pada tahun 2007 mencapai 79,33 % dan tahun 2008 mencapai 104,97 % pada tahun 2009 mencapai 63.45 %. Sehingga dari data diatas dapat dilihat bahwa kemampuan dalam mengumpulkan pajak tersebut dinilai dapat berjalan.

Namun menjadi suatu pertimbangan bahwa dalam penerimaan pajak tersebut masih terdapat gejala yang dinilai akan mempengaruhi standarisasi penerimaan pajak sarang burung walet tersebut yang :

1. Dalam proses pembayaran pajak tersebut, pengusaha mengakui belum mengetahui sistem penetapan pembayaran pajak. Sehingga merasa tidak memahami dan kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak Burung walet.
2. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan dan Pemerintah Daerah sehingga masih banyak pengusaha yang tidak melaporkan hasil panen penangkaran sarang burung walet.
3. Petugas Dipenda kurang pro aktif dalam melakukan pendataan pajak sarang burung walet yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari permasalahan tersebut diatas serta dengan fenomena yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu, ***“Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir”***.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Indragiri Hilir yaitu terdapat 792 penangkar burung walet, maka dengan potensi tersebut penerimaan pajak tersebut dapat diandalkan sebagai penerimaan asli daerah serta kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pada kenyataannya bahwa setiap tahun mulai dari tahun 2005 sampai pada tahun 2008 penerimaan pajak sarang burung walet mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Mencermati kondisi tersebut, dapatlah dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini sebagai berikut : **“Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pengusaha Walet di Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan atau informasi bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Sebagai informasi dasar bagi penelitian berikutnya dengan permasalahan yang sama.
3. Menambah pengetahuan bagi penulis sehingga menjadi pengalaman yang bermanfaat dikemudian hari.
4. Sebagai sumbangsih bagi perkembangan Ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan

I. : Pendahuluan

Bagian ini merupakan pendahuluan di mana dikemukakan hal-hal yang mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

II. : Telaah Pustaka

Pada bagian ini penulis mengemukakan berbagai teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti pengertian atau definisi, hipotesis, konsep oprasional, dan variabel.

III. : Metodologi Penelitian

Bagian ini menguraikan mengenai metodologi penelitian berupa jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

IV. : Gambaran Umum

Pada bab ini menguraikan sejarah Kabupaten Indragiri Hilir, Penduduk, Sosial, Geografis dan Monografis Kabupaten Indragiri Hilir, Keberadaan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.

V. : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini yang nantinya akan membahas serta menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

VI. : Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Pemerintah

Istilah pemerintah dapat dibedakan antara *pemerintah dalam arti sempit* dan *Pemerintah Dalam Arti Luas* antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam arti sempit yaitu meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintah (Eksekutif)
2. Pemerintah dalam arti luas selain eksekutif juga terdapat lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (Legislatif) dan juga yang melaksanakan peradilan (Yudikatif). (Kansil, 2008 :17)

Sedangkan pemerintah dalam arti luas menurut C.F. Stong Harus mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara kedalam dan keluar. Oleh karena itu *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan perang, *kedua* harus mempunyai kekuatan legislatif dalam arti pembuatan undang-undang. *Ketiga* mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaban negara dengan penyelenggaraan peraturan hal ini dimaksud untuk penyelenggaraan kepentingan negara (Syafi'I, 2007 : 17)

Menurut Situmorang dalam Faisal (2008:13) Pemerintahan dapat diartikan sebagai badan atau lembaga-lembaga para penguasa sebagai pejabat pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati seluruh ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, terlaksana oleh setiap warga Negara secara perseorangan

maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan maupun kemasyarakatan.

Apabila ditinjau dari definisi pemerintah, Syafiie (2006:134) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “*perintah*” tersebut memiliki empat unsur yaitu :

1. Ada dua pihak yang terkandung.
2. Kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan
3. Pihak yang memerintah memiliki wewenang
4. Pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Sedangkan menurut Budiardjo dalam (Faisal.2008:13) mengatakan bahwa Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya Negara dalam ilmu politik adalah Negara (*State*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy*, *beleid*) dan pembagian (*distribution*), atau alokasi (*allocation*).

Pada saat ini, pemerintah terlaksana di tingkat kota sampai tingkat desa telah memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terlahir untuk kepentingan masyarakat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, ditetapkan berdasarkan atas kuatnya tuntutan masyarakat akan perlunya mengatur dirinya sendiri, sebagai

dampak negatif dari sentralisasi yang dirasakan terlalu lama semasa Orde Baru. Oleh karena tuntutan masyarakat itu begitu mendesak dan harus direspon dalam waktu singkat, maka pemerintah dengan persetujuan DPR-RI mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

Dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatur wilayahnya masing-masing yang sering disebut dengan otonomi daerah, Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2.2. Kebijakan

Secara harfiah ilmu kebijakan publik terjemahan dari kata “*policy science*”. Tokoh atau penulis kebijakan publik adalah “Willian Dunn, Charles Jones, Lee Friedman” mereka menggunakan kata “*Public Policy, Public dan Policy Analysis*” dengan pengertian yang berbeda.

Kata kebijakan secara etimologis istilah *policy* (kebijakan) berasal, sansekerta, dan latin. Akar kata dalam bahasa yunani dan sansekerta *Polis* (negara-kota) dikembangkan dalam bahasa yunani dan sansekerta menjadi *Politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa inggris pertengahan, *policie* yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (N.Duun 2003:51). Kemudian dalam bahasa Indonesia “Kata Kebijakan dan

Kebijaksanaan” Bijak atau bijaksana dalam bahasa inggris “*Wisdom*”. Asal katanya “*Wise*”. Dari pengertian ini sifat bijaksana itu bukan hanya sekedar “pintar atau cerdas (*smart*)”.

Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan baik untuk mendamaikan *claim* dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan *Incentive* bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan, tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut dengan demikian jika pihak-pihak yang konflik usaha untuk mengatasinya antara lain dengan suatu kebijakan (*policy*) (Thoha, 2005 : 60)

N.Dunn, (2003:22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah :

Serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Carl J. Friedrich dalam(Irfan,2003: 17) Mendefinisikan kebijaksanaan sebagai berikut ” serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjuk hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan Amara Raksasatya mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. (Irfan, 1991:18).

Di Indonesia menggunakan istilah “*Kebijaksanaan dan Kebijakan*” dari terjemahan *policy* yang dikaitkan dengan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Pandangan ini disejalkan dengan pengertian “*Public*” yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum.

Perbedaan antara Kebijakan dengan Kebijakan, yang membedakan istilah “*policy*” sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah “*discretion*” yang diartikan keputusan yang bersifat kasuistis untuk satu hal.

Kajian tentang kebijakan dalam arti luas sebagai usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan tahu arti keputusan. Kajian kebijakan dimulai dari yang paling irasional sampai pada yang rasional

dengan mengkombinasikan kuantitatif-kualitatif. Sebagai suatu ilmu kebijakan itu baru dikenal setelah perang dunia ke II.

Pada saat sekarang persoalan publik menjadi lebih kompleks. Tidak ada satu masalah hanya dipandang hanya “*satu*” aspek yang berdiri sendiri, tetapi terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Keterkaitan itu tidak terbatas pada satu lingkungan tertentu, tetapi dapat dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang luas yang berkaitan dengan aspek-aspek yang berbeda-beda dan berlaku secara cepat.

Dalam mengukur pelaksanaan kebijakan tersebut Hugh Heglo dalam (N. Dunn, 2003:29) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan (*a course of action intended to accomplish some end*). Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Chalers Jones dalam kaitan dengan beberapa isi ukuran kebijakan yaitu :

1. Tujuan yaitu tujuan yang dikehendaki untuk dicapai.
2. Rencana atau proposal yaitu alat atau cara untuk mencapai tujuan.
3. Program atau cara tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan untuk mencapai tujuan.
4. Keputusan yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak (*effect*) yaitu yang ditimbulkan dari suatu program dalam masyarakat.

Selanjutnya dapat dilihat konsep analisis kebijaksanaan yang dikemukakan oleh Quade dalam (N. Dunn,2003:95) mengemukakan bahwa analisa kebijaksanaan adalah suatu bentuk yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan, menyajikan, dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijaksanaan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai landasan pembuatan kebijakan politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijaksanaan.

Menurut Wibawa dalam (Nogi s. 2003:7) Implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun bebentyk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dengan berbagi cara "menggambarkan struktur" proses implementasi tersebut.

Selanjutnya Winarno, dalam (Faisal,2008:32) Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Dimana implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan dan program-program. Sedangkan Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan dengan beserta

konsekwensi – konsekwensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Daniel A. dan Paul A. dalam (Abdul, 1990:51) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa “ memahami apa yang senyatanya terjadi sudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha yang mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat / dampak nyata bagi masyarakat atau kejadian-kejadian.

Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam (Abdul, 1990:64) memberikan pandangan bahwa implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijaksanaan semacam itu, dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang di kehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang menjalankan kebijakan.

Dalam rangka pencapaian kesesuaian antara tujuan dan sasaran kebijakan dengan kenyataan di lapangan. Salah seorang pakar bernama *Jan Marse* (dalam Nogi S.2003:11) mengidentifikasi faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam implementasi suatu kebijakan yaitu :

1. Informasi

Informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman, visi dan misi kebijakan yang dirumuskan. Informasi akan

mengalir efektif jika kelompok orang yang bekerjasama saling peduli dan terbuka. Kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek maupun kepada para pelaksanaan dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan.

2. Isi Kebijakan

Mengingat kebijakan publik merupakan sarana untuk mengatasi permasalahan publik, maka isi kebijakan dimaksud untuk mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Isi kebijakan harus jelas dan tegas serta mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodir kepentingan seluruh *stakeholders*. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidaktepatan, ketidaktegasan intern maupun eksteren atau kebijakan itu sendiri. Menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

3. Dukungan

Dukungan yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa dukungan fisik maupun non-fisik, apabila dalam pelaksanaanya tidak cukup membantu dukungan untuk kebijakan tersebut maka implementasi kebijakan publik akan sulit untuk dilaksanakan. Dukungan yang di maksud *Jan Marse* berkaitan untuk partisipasi masyarakat sebagai salah satu *stakeholders* dalam proses pelaksanaan program.

4. Pembagian Potensi

Elemen pembagian potensi pada dasarnya berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intensif antar pelaku yang ada, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas. Koordinasi dibutuhkan karena setiap pelaku memiliki latar belakang, kepentingan keinginan yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik sentral sebagai titik temu bagi keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan

Sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “*evaluasi kebijakan*”.

N. Dunn (2003: 608) mengemukakan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*) pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*accessmant*).

Sedangkan menurut Parsons (2006:547) evaluasi adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

2.3. Pengertian Pajak dan Pajak Sarang Burung Walet

Apabila dilihat pada sejarah pemungutan pajak yang mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara terlaksana di dalam kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan Negara, seperti menjaga keamanan

Negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya. (Bohari, 2008:1)

Prof. Dr. PJA. Adriani dalam (Bohari, 2008 :23) memberikan definisi sebagai berikut Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.

Pajak menurut Soeparman Dalam (Waluyo,2007:3) adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Ismawan (2001:4) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum penarikan pajak secara yuridis *dapat dipaksakan* atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak (WP) dalam jangka waktu tertentu maka penagihan dapat dilakukan secara kekerasan seperti melalui surat paksa, sita, lelang, dan sandera.

Menurut Guritno Mangkoesebroto dalam (Azwar,2008 :36) memberikan definisi pajak sebagai berikut Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang

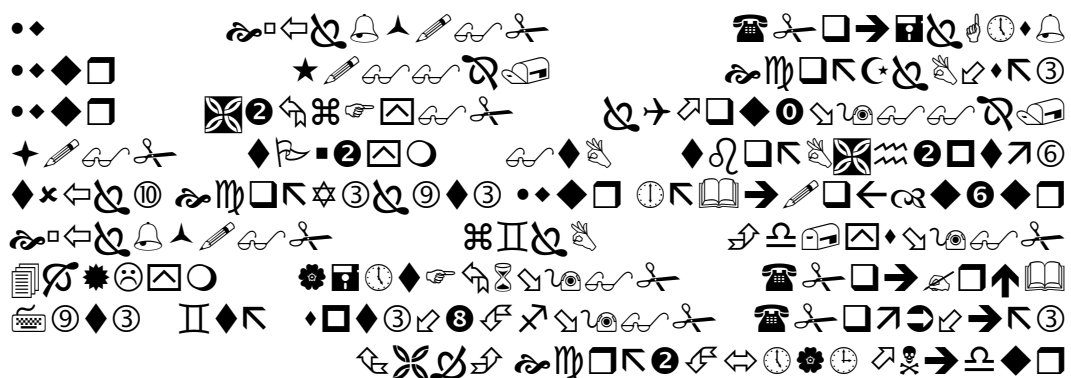
pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk itu tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya.

Adapun pajak memiliki dua fungsi sebagai berikut :

1. Berfungsi sebagai *Budgeter*, karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting dari pemerintah membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Berfungsi sebagai *Regulatory*, karena pajak berfungsi sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi masyarakat.

Jika dilihat dari konsep pajak, maka pajak biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Pajak dalam pandangan islam sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At- Taubah Ayat 29.



Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan

agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.(At- Taubah : 29)

Pajak dalam islam disebut dengan jizyah yaitu pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah pungutannya dapat dipaksakan di mana dalam ayat di atas boleh diparangi bagi yang tidak mau membayar jizyah. Sebagaimana pajak dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika pajak di pungut menurut secara islam bagi yang enggan membayar pajak dapat ditagih secara paksa, sita dan bahkan boleh diparangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap aturan yang telah dikeluarkan.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.

- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sementara itu dapat dilihat pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis Pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif

- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dan
- h. Menjaga kelestarian lingkungan

Dari dasar di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Indragiri Hilir membentuk peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Dalam melaksanakan pemungutan sarang burung walet ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Sedangkan tahapan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Pendataan

Pendataan merupakan kegiatan turun lapangan/masyarakat untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai, pendataan bertujuan untuk mengetahui hasil panen penangkaran sarang burung walet yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang mengusahakan dan mengambil Sarang Burung Walet.

Sebagaimana tugas pokok dari Bagian pendataan, Penetapan dan keberatan kegiatan pendataan dilakukan dengan oleh tim pendata yang dibentuk oleh Bagian Pendataan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian tim pendata melakukan pendataan kepada wajib pajak atas hasil panen pengkarang sarang burung Walet yang dimiliki. Adapun

ukuran keberhasilan dari tim ini adalah data yang dikumpulkan benar dan akurat hal ini akan membantu pemungutan pajak sarang burung Walet dapat optimal.

2. Perhitungan dan Penetapan

Tata cara perhitungan besar pajak yang harus dibayarkan dengan cara sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual Sarang Burung Walet
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan banyaknya/besarnya Sarang Burung Walet yang dipanen dengan harga yang berlaku di pasaran sesuai dengan jenis masing-masing Sarang Burung Walet.

Pasal 4

Besarnya tarif Pajak ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan.

Pasal 5

Besarnya pajak yang terhutang adalah dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 3

Data hasil penjualan tersebut dikumpulkan dan di hitung kemudian diterbitkan surat ketetapan Pajak walet. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diserahkan kepada seksi penagihan dan pengendalian untuk mengumpulkan dari pengusaha walet.

Penetapan pajak sarang burung walet diatur pada pasal 11

- (1) Bagi Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD digunakan untuk menghitung dan menetapkan nilai pajak yang terhutang
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah jatuh tempo terhutang pajak Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN

3. Pemungutan dan Pembayaran

Pembayaran pajak terhutang diatur pada pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Umum Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT dan STPD
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Bendahara Umum Daerah selambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak yang terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan tambahan pembayaran 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas yang ditentukan sesuai persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan tambahan pembayaran 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar
- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4) pasal ini diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, serta ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau lainnya yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dalam surat teguran atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan cara paksa
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 hari sejtanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis
- (3) Bentuk, jenis, isi, serta formulir dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditentukan dengan peraturan bupati.

2.4. Konsep Operasional

Untuk membangun kesamaan persepsi dan pengertian serta menghindari salah pengertian terhadap istilah yang digunakan pada judul penelitian ini, maka akan di operasionalkan beberapa konsep yang bersifat membatasi :

1. Implementasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam

melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet

2. Peningkatan adalah suatu tindakan yang dilakukan agar memperoleh hasil yang lebih terlaksana dari sebelumnya
3. Penerimaan adalah suatu hasil yang dicapai Pemerintah Daerah dalam hal ini Pajak Sarang Burung Walet dari pengusaha yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
4. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
5. Implementasi kebijakan adalah tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Dimana implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan dan program-program.

2.5. Teknik Pengukuran

Sesuai dengan penelitian yang bersifat diskriptif, maka dalam pengukuran indikator, variabel pelaksanaan Peraturan Daerah No 09 tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet, adalah sebagai berikut:

1. Pendataan terhadap hasil penjualan sarang burung walet.

- Sangat Sering : Apabila pendataan dilakukan berulang-ulang dalam setiap panen dilaksanakan untuk menjamin keakuratan data yang dikumpulkan.
- Sering : Apabila pendataan dilaksanakan setiap 2 kali panen sarang burung walet
- Cukup Sering : Apabila pendataan dilaksanakan setiap 3 kali panen sarang burung walet
- Kurang Sering : Apabila pendataan dilaksanakan hanya sekali dalam satu periode pajak
- Tidak pernah : Apabila sama sekali tidak pernah dilaksanakan pendataan

2. Perhitungan dan Penetapan pajak sarang burung walet

- Sangat Sering : Apabila penghitungan dan penetapan dilaksanakan dalam setiap panen sarang burung walet
- Sering : Apabila penghitungan dan penetapan dilaksanakan dalam setiap 2 kali panen sarang burung walet
- Cukup Sering : Apabila penghitungan dan penetapan dilaksanakan dalam setiap 3 kali panen sarang burung walet
- Kurang Sering : Apabila apabila Penghitungan dan penetapan dilaksanakan hanya sekali dalam satu priode pajak
- Tidak pernah : Apabila tidak pernah dilaksanakan perhitungan dan penetapan

3. Pemungutan dan Pembayaran pajak sarang burung walet

- Sangat Sering : Apabila pemungutan dan pembayaran pajak dilaksanakan sekali dalam satu tahun pajak
- Sering : Apabila pemungutan dan pembayaran dilaksanakan lebih dari 2 kali pelaksanaan kegiatan pemungutan
- Cukup Sering : Apabila pelaksanaan pemugutan dan pembayaran dilakuakn lebih dari 3 kali kegiatan pemungutan pajak sarang burung walet.
- Kurang Sering : Apabila pemungutan dan pembayaran dilaksanakan berulang-ulang dalam satu tahun sehingga waktunya tidak efektif
- Tidak Pernah : Apabila tidak pernah dilakukan pemungutan dan masyarakat tidak berpartisipasi dalam pembayaran pajak sarang burung walet

2.6. Variabel Penelitian

Adapun Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah Tahapan Implementasi Peraturan Daerah No 09 tahun 2008 yang terdiri dari :

1. Pendataan terhadap hasil penjualan sarang burung walet.
2. Perhitungan dan Penetapan pajak sarang burung walet
3. Pemungutan dan Pembayaran pajak sarang burung walet

2.7. Hipotesis

Diduga Implementasi Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) Nomor 09 tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang ada :

1. Masih adanya wajib pajak yang belum mengetahui sistem penetapan pembayaran pajak.
2. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan dan Pemerintah Daerah sehingga masih banyak pengusaha yang tidak melaporkan hasil panen penangkaran sarang burung walet

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi. Data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan angket, serta data dan informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan variabel penelitian. Bertitik tolak dari pemanfaatan data tersebut, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena organisasi ini merupakan organisasi yang mengurus pengelolaan dan penerimaan pajak, termasuk pajak sarang burung walet. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan tanggal 25 Januari 2010 S/d 25 Februari 2010.

3.3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung di lapangan dari pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel, yakni Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Data Sekunder, merupakan data pelengkap yang diperoleh dari pihak kedua sehubungan dengan pembahasan ini, antara lain :

- Sejarah ringkas Kantor Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir
- Tugas pokok, kedudukan dan fungsi Kantor Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir
- Susunan Organisasi dan Uraian Tugas
- Keadaan Pegawai dan Fasilitas Kerja pada Kantor Dipenda Inhil
- Struktur Organisasi Kantor Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, adalah kegiatan pengumpulan data yang diperlukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan sehubungan dengan system pembayaran pajak walet yang dilakukan oleh pengusaha walet kepada pemerintah melalui Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir
2. Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan dan terpimpin terhadap sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan.
3. Angket/Kuesioner, yaitu suatu aktivitas pengumpulan data dengan menyebarkan angket berupa suatu daftar pertanyaan tertulis kepada responden terpilih untuk diisi sesuai dengan alternatif jawaban yang telah disediakan.

3.5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha burung walet yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 792 pengusaha/ responden.

2. Sampel

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah populasi yang relative cukup banyak, maka untuk memerlukan data yang dibutuhkan, diambil beberapa sampel dari setiap unsur populasi yang dirasa memungkinkan untuk mewakili setiap kelompok. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu Dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam hal ini sampel diambil dari sebagian jumlah populasi yang dinilai dapat mewakili keseluruhan responden penelitian (Sugiyono, 2007 : 96)

Dalam penelitian ini untuk penarikan sampel peneliti menggunakan Rumus Slovin (Husain,2004 : 107) yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n= Ukuran sampel

N= Ukuran populasi

e = Taraf kesalahan dalam penentuan sampel.

$$n = \frac{792}{1 + 792(0.05)^2}$$

$$n = \frac{792}{1 + 791(0.0025)}$$

$$n = \frac{792}{1 + 2.005}$$

$$n = \frac{792}{3.005}$$

$$n = 263.56$$

$$n = 263$$

3.6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah dan Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Merasa persyaratan Administrasinya terpenuhi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom) Setelah melalui berbagai penelitian yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, maupun oleh Departemen Dalam Negeri. Maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Riau (propinsi Riau) tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten / Daerah Tingkat II. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tahun 1965). Maka Daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi kabupaten Daerah Tingkat II (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965. Daerah ini terletak dibagian selatan Propinsi Riau dengan luas wilayah 11.605,97 Km² dalam posisi :

0°36' : Lintang Utara.
1°07' : Lintang selatan.
104°10' : Bujur Timur dan
102°32' : Bujur Timur

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit-parit dengan menggunakan kendaraan speedboat maupun pompong dan perahu. Di antara sungai-sungai yang utama di Daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Provinsi Sumatera Barat) yang bermuara diselat berhala.

Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan Visi sebagai berikut ***"Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang 2025"***

Untuk merealisasikan Visi tersebut, maka ditetapkan Lima Misi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir kedepan yakni:

1. Mewujudkan daya saing Daerah
2. Mewujudkan suasana bermasyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah yang demokratis
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
4. Mewujudkan suasana aman, damai dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya

5. Mewujudkan Daerah yang memiliki peran penting pada tingkat Regional, Nasional dan Internasional.

Adapun jarak antara ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. IV.1. : Jarak Ibukota Kabupaten Dengan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Ibukota Kabupaten	Ibukota Kecamatan	Jarak Lurus (km)
1	TEMBILAHAN	Kota Baru	165
		Selensen	175
		Pulau Kijang	101
		Benteng	85
		Enok	88
		Kuala Enok	53
		Sapat	23
		Concong	18
		Tembilahan	0
		Tembilahan Hulu	1
		Sungai Salak	40
		Harapan Tani	15
		Sungai Piring	22
		Teluk Pinang	65
		Kuala Lahang	75
		Khairiah Mandah	97
		Sungi Guntung	168
		Pelangiran	160
		Saka Rotan	165
		Pulau Burung	170

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir. 2008

1. Pemerintahan

Pembentukan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-undang No 6 Tahun 1965 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 14 tahun 1965 dengan ibukotanya Tembilahan. Pada tahun ini Wilayah administrasi Pemerintahan Daerah terdiri dari 20 kecamatan, 18 kelurahan dan 175 Desa.

2. Penduduk

Masalah penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir sama halnya seperti Daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

3. Sosial

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

4.2. Keberadaan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah

Sejalan dengan berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan, oleh karena itu Pemerintah Daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah Pungutan Penghasilan Daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Kegiatan pembangunan di daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan kegiatannya yaitu otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perlu memandang adanya keserasian dalam pengumpulan dana untuk membiayai Pembangunan Daerah.

Pada awal berdirinya kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan bagian Keuangan dan Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah Tingkat II Indragiri Hilir.

Seiring kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sendiri. Pada saat Dinas Pendapatan Daerah berdiri sendiri di bawah pimpinan Bapak “H. Usman Fu’ad”. Setelah lebih kurang 40 tahun berjalannya Dinas Pendapatan Daerah, pada pertengahan bulan Juli 2005 berpindah ke Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan yaitu *Gedung Inhil business Center* yang dibangun mulai tahun 2003. Di *Gedung Inhil business Center* Dinas Pendapatan Daerah satu atap dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR-Gemilang), juga sebagai Kantor Pelayanan terpadu Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPPMPD)

Adapun nama-nama Yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. H. Usman Fu’ad.
2. Yudha Yahya, BA
3. Drs. Alibun Siregar
4. Drs. Jaelani Sabrah
5. Drs. Nazarudin Ahmad
6. Drs. Indra Bangsawan
7. Drs. Said Sarifuddin

8. Drs. Husni Hasan
9. H. Edy Syafwannur, SE.MP
10. Drs. H. A. Rasid.HZ (Kadispenda sekarang)

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 tahun 2004 tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Pendapatan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang Anggaran Pendapatan Daerah.
2. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian Pendapatan Daerah.
3. Pengembangan upaya-upaya peningkatan pendapatan.
4. Perumusan pendataan serta penetapan penerimaan
5. Penyusunan data dan informasi dibidang pendataan dan penerimaan daerah
6. Pelaksanaan penagihan, pembukuan dan verifikasi
7. Penagihan dan perhitungan serta restitusi
8. Penyelasaan keberatan / gugatan
9. Penatausahaan retribusi dan pendapatan lain-lain
10. Pelaksanaan inventarisasi dan pembukuan benda dan barang kebutuhan
11. Penetapan dan pnagihan pajak dan Non pajak
12. Pengkajian upaya-upaya peningkatan pendapatan
13. Pengembangan sistem informasi keuangan dan metode pendapatan daerah

14. Pelaksanaan administrasi umum, menyusun program, keuangan kepegawaian dan perlengkapan

15. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

untuk melaksanakan Fungsi tersebut di atas Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan.
2. Penelitian dibidang pendapatan daerah yang mencakup wilayah kabupaten di bidang pendapatan
3. Menyusun kebijakn teknis dan program
4. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah
5. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah
6. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan peningkatan pendapatan
7. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan di bidang pendapatan daerah
8. Penyelenggaraan dan pengawasan standar minimal dalam bidang pendapatan daerah
9. Penyusunan recana program di bidanng pendapatan
10. Penyelenggraan sistem pendapatan daerah
11. Penyelenggraan dan pengawasan pendidikan pelatihan di bidang pendapatan daerah

3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin kegiatan Dinas baik administratif maupun operasional sesuai dengan tugas pokok fungsi dan wewenang dinas.
- b. Sub Bagian Sekretariat yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan administrasi dan urusan umum, program, keuangan, kepegawaian dan urusan perlengkapan serta inventarisasi benda dan barang kebutuhan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Sekretariat dibantu beberapa urusan bagian yang terdiri dari bagian program, Umum dan Perlengkapan, Sub bagian Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pendataan dan Penetapan, pemeriksaan data serta dokumentasi. Dalam melaksanakan tugasnya bidang ini dibantu oleh dua seksi yaitu seksi pendataan, penetapan dan seksi Keberatan.
- d. Bidang Pajak, Retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penatausahaan penerimaan Pajak dan Retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya Dalam melaksanakan tugasnya bidang ini dibantu oleh seksi Pajak, Seksi Retribusi dan Pendapatan asli daerah Lainnya.
- e. Bidang Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, perhitungan restitusi serta pelaporan. Dalam hal pelaksanaan tugasnya bidang ini dibantu oleh seksi pembukuan dan verifikasi, seksi pelaporan dan restitusi.

- f. Bidang Dana Perimbangan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengelola Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bidang ini memiliki dua seksi yaitu seksi Pajak Bumi dan Bangunan, Non Pajak. dan Seksi Dana Perimbangan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan Yang terdiri dari :
 - 1. UPTD Tempuling
 - 2. UPTD Tanah Merah (Wil. Kerja : Tanah Merah dan Enok)
 - 3. UPTD Kuala Indragiri
 - 4. UPTD GAS (Wil.kerja: Gas dan Batang Tuaka)
 - 5. UPTD Gaung
 - 6. UPTD Reteh
 - 7. UPTD Kritang (Wil.kerja: Kritang dan Kemuning)
 - 8. UPTD Mandah
 - 9. UPTD Kateman (Wil. Kerja : Kateman, Pulau Burung, Teluk Balengkong dan Pelangeran)
 - 10. UPTD Tembilahan

3. Gambaran Personil Dinas Pendapatan

Selanjutnya di bawah ini dapat dilihat struktur organisasi Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dilihat pada lembaran lampiran laporan penelitian ini.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi yang melakukan pembinaan dan penataan tenaga kerja di Kabupaten Indragiri Hilir, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki jumlah pegawai sebanyak 82 orang dengan golongan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat jumlah PNS pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Dilihat Dari Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	IV	2
2	III	35
3	II	40
4	I	5
	Jumlah	82

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2010

Selanjutnya dapat juga dilihat tingkat pendidikan pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang dinilai akan berpengaruh dalam menjalankan tugas yang dibebankan sesuai dengan kewenangannya. Dimana pada saat ini Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki pegawai untuk tingkat pendidikan S-2 sebanyak 2 (dua) orang, untuk pendidikan S-1 berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, Pendidikan Sarjana muda 4 (empat) orang, SLTA 50 (lima puluh) orang, SLTP 3 (tiga) orang, SD 4 (empat) orang . Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Dilihat Dari Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Formal	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana	2
2	Sarjana	21
3	Sarjan Muda	4
4	SLTA	50
5	SLTP	3
6	SD	4
	Jumlah	82

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendidikan pegawai pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dinilai telah memadai. Hal ini dinilai dari jumlah tingkat pegawai didominasi pada tingkat pendidikan S-1. Sehingga dengan tingkat pendidikan tersebut lebih mampu untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan.

Disamping jumlah personil sebagaimana tersebut di atas, dan memperhatikan tugas pokok serta fungsi Dinas Pendapatan Daerah yang cukup luas dan memiliki spesifikasi tersendiri dalam menjalankan tugas, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir juga memperkerjakan/ memperbantuan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 62 orang.

Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil tersebut tersebar di seluruh wilayah kerja UPTD dengan tugas pokok "Sebagai Juru Pungut". Adapun gambaran penempatan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.IV.4 : Gambaran Penempatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

NO	WILAYAH KERJA JURU PUNGUT	JUMLAH PERSONIL
1	UPTD Kecamatan Tempuling	3
2	UPTD Kecamatan Tanah Merah	2
3	UPTD Kecamatan Kritang	3
4	UPTD Kecamatan Reteh	3
5	UPTD Kecamatan Gaung Anak Serka	4
6	UPTD Kecamatan Gaung	3
7	UPTD Kecamatan Mandah	2
8	UPTD Kecamatan Kateman	5
9	UPTD Kecamatan Tembilahan	35
10	UPTD Kecamatan Kuindra	2
	JUMLAH	62

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2010

4. Visi dan Misi Dinas Pendapatan

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah *” Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Optimal”* sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Pendapatan Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta Pengkajian Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sumber Daya Alam yang dimiliki.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas
4. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah secara profesional.

6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
7. Meningkatkan penegakan Supermasi Hukum baik terhadap aparatur maupun terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

5. Tujuan Dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dari Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang dikemukakan. Maka perlu dijabarkan keadaan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perbuatan tujuan dan sasaran operasional, tujuan Dinas Pendapatan Daerah adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Publik Pemerintah.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik
4. Meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah dan Belanja Pembangunan.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat diukur apa yang dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendapatan Daerah itu adalah :

1. Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Adanya data-data Objek dan Subjek Pajak dan Retribusi Daerah yang akurat
5. Meningkatkan akuntabilitas publik
6. meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Reponden

Sebelum penulis membahas dan menganalisa lebih lanjut tentang Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir, maka terlebih dahulu penulis memaparkan identitas responden yang diidentifikasi, adalah sebagai berikut:

1. Responden Menurut Tingkat Usia

Secara teoretis faktor usia akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian pula dalam menentukan pilihan, usia akan memberikan pengaruh, semakin tinggi tingkat usia semakin baik karena tingkat kematangan emosi seseorang dalam berfikir. Selanjutnya tingkat usia juga akan mempengaruhi seseorang melakukan setiap aktifitas dalam kehidupannya., karena itu tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang. Faktor usia juga mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan tingkat usia responden dapat diterangkan dalam tabel V.1. di bawah ini:

Tabel V.1 . Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia.

No	Tingkat Usia	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	20 – 25	10	4%
2	26 – 30	15	6%
3	31 – 35	85	32%
4	36 – 40	94	36%
5	41 – 45	25	9%
6	46 – 50	20	7%
7	>51	15	6%
	Jumlah	263	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.1 di atas dapat dilihat bahwa responden yang terbanyak adalah berumur 36 - 40 tahun sebanyak 94 orang, sedangkan yang paling sedikit yaitu antara umur 20 – 25 tahun sebanyak 10 orang. Jadi dapat dikatakan bahwa responden dalam penelitian ini adalah mereka yang berusia 30 tahun ke atas, dan dapat diasumsikan tidak ada masalah dalam kualitas dan produktivitas kerja.

2. Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagai dasar pertimbangan untuk mempedomani segala sesuatu yang menyangkut dengan keterangan, tanggapan, dan jawaban-jawaban yang diberikan responden pada masalah variabel penelitian maka penulis terlebih dahulu melihat dari segi latar belakang tingkat pendidikan responden. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.2. Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Responden	Jumlah (orang)	Persentase%
1	Strata 2	21	8%
2	Strata 1	95	36%
3	Diploma 3	18	7%
4	Sekolah Menengah Atas	106	40%
5	Sekolah Menengah Pertama	25	9%
	Jumlah	263	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.2. di atas, dapat dilihat bahwa responden yang terbanyak adalah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 106 orang sedangkan yang paling sedikit yaitu tingkat Akademi/Diploma sebanyak 18 orang responden, Maka dapat diakumulasikan bahwa tingkat pendidikan SLTA lebih

dominan, artinya lebih banyak yang mengetahui dan menyadari pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban setiap warga negara.

5.2. Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Salah satu daerah yang menggunakan pajak sebagai modal pembangunan dan menjalankan program pemerintah daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Dimana pungutan yang termasuk dalam golongan pajak terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Pengambilan Hasil Laut & Budidaya Perikanan
9. Pajak Pendaftaran Perusahaan
10. Pajak Usaha Penyewaan Bangunan

Dari pemungutan pajak di atas merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan pada seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga setiap Kecamatan dan Instansi akan memberikan peranan penting dalam pemungutan pajak tersebut.

Dari pemungutan pajak tersebut dapat dilihat bahwa salah satu pajak yang dinilai mampu memberikan masukan pendapatan yang hampir selalu mencapai realisasi dari target setiap tahunnya adalah pajak yang berasal dari sarang burung walet. Dalam melaksanakan pemungutan sarang burung walet ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Pada pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet menjelaskan bahwa:

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas Sarang Burung Walet
- (2) Objek Pajak adalah pengambilan Sarang Burung Walet
- (3) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan dan atau mengambil Sarang Burung Walet
- (4) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melaksanakan pajak yang terhutang termasuk pungutan atau pemotongan Pajak tertentu.

Sedangkan mengenai tarif pajak diatur pada pasal 3 yang menjelaskan bahwa:

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual Sarang Burung Walet
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan banyaknya/besarnya Sarang Burung Walet yang dipanen dengan harga yang berlaku di pasaran sesuai dengan jenis masing-masing Sarang Burung Walet.

Pada pasal 4 menjelaskan bahwa:

Besarnya tarif Pajak ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan penugasan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet dan Pembentukan Tim Pengawas Pengelolaan/pemanfaatan Sarang Burung Walet. Sehingga dari surat keputusan ini diberikan tugas kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk memungut pajak sarang burung walet tersebut.

Di samping itu dapat dilihat bahwa pajak daerah yang dikelola oleh Dipenda sebanyak 10 (sepuluh) bentuk pajak sementara pajak lainnya dilaksanakan pemungutannya oleh Dinas-Dinas yang memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dimana pada saat ini Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai 33 jenis Retribusi.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Kabupaten, maka dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan, daerah dituntut untuk menggali

potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu potensi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan akan membantu pelaksanaan pembangunan Kabupaten adalah pengelolaan sarang burung walet.

Burung walet yang bersarang di pinggir-pinggir sungai, goa-goa alam/buatan, rumah-rumah penduduk dan di bangunan lainnya merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dimana potensi ini dinilai cukup potensial yang terdapat di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun jumlah pengusaha burung Walet yang ada di Kabupaten ini berjumlah 792 buah yang tersebar di 14 Kecamatan.

Selanjutnya untuk mengetahui Implementasi peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet ini ditetapkan beberapa indikator yang relevan, yang pembahasannya dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Pendataan Terhadap Hasil Penjualan Sarang Burung Walet.

Pendataan merupakan kegiatan turun kelapangan untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai, pendataan bertujuan untuk mengetahui hasil panen penangkaran sarang burung walet yang dimiliki oleh orang baik pribadi atau badan yang mengusahakan dan mengambil Sarang Burung Walet.

Sebagaimana tugas pokok dari bagian pendataan, penetapan dan keberatan kegiatan pendataan dilakukan oleh tim pendata yang dibentuk oleh bagian pendataan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian tim pendata melakukan pendataan kepada wajib pajak atas hasil panen penangkaran sarang

burung walet yang dimiliki. Adapun ukuran keberhasilan dari tim ini adalah data yang dikumpulkan benar dan akurat. Hal ini akan membantu pemungutan pajak sarang burung Walet secara optimal. Berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai pendataan terhadap hasil penjualan sarang burung walet dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. V.3: Jawaban Respoden Dispenda Memberikan Sosialisasi kepada Masyarakat Tentang Peraturan Daerah No 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sering	105	40%
2	Sering	60	23%
3	Cukup Sering	29	11%
4	Kurang Sering	69	26%
5	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		263	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.3. di atas Jawaban Respoden tentang Dispenda memberikan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat, dapat dilihat bahwa dari 263 orang responden yang ditemui oleh peneliti, 105 orang responden (40%) mengatakan sangat sering, hal ini dikarenakan menurut responden masyarakat sering mendapat informasi yang dibutuhkan tentang Peraturan Daerah No 09 tahun 2008 ini dari petugas saat melakukan pendataan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami isi Parda ini dengan baik. Sedangkan 69 orang responden (26%) mengatakan kurang sering adalah dikarenakan menurut responden masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai Peraturan Daerah No 09 tahun 2008 ini akibatnya masih terdapat masyarakat yang belum paham mengenai Peraturan Daerah ini.

Tanggapan Dispenda, Dispenda telah melaksanakan sosialisasi Peraturan ini baik secara langsung maupun dalam bentuk iklan-iklan di lembaga penyiaran SGTV, Namun sosialisasi dalam bentuk baliho, papan iklan memang belum dilaksanakan.

Tabel. V.4: Jawaban Responden Apakah Petugas Sering Menerima Dengan Baik Masukan Dari Masyarakat Saat Melakukan Pendataan.

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sering	-	-
2	Sering	66	25%
3	Cukup Sering	20	8%
4	Kurang Sering	108	41%
5	Tidak Pernah	69	26%
Jumlah		263	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.4. di atas Jawaban Responden apakah masyarakat sering memberikan masukan kepada petugas saat melakukan pendataan, dapat dilihat bahwa dari 263 orang responden yang ditemui oleh peneliti, 66 orang responden (25%) mengatakan sering, hal ini dikarenakan menurut responden banyak petugas yang menerima dengan baik masukan dari masyarakat dan kemudian dilaksanakan dengan baik, misalnya dalam suatu kecamatan terdapat wajib pajak yang belum terdata maka kemudian petugas melakukan pendataan terhadap wajib pajak yang belum terdata. Sedangkan 69 orang responden (26%) mengatakan Tidak Pernah adalah dikarenakan menurut responden masih terdapat petugas yang mengabaikan masukan dari masyarakat sehingga sering dijumpai masalah yang sama pada saat pendataan tahun berikutnya misalnya kepada pengusaha yang beroperasi lagi tempat usahanya masyarakat mencoba memberikan masukan kepada petugas, namun

pada tahun berikutnya masih dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (STPD)nya, hal ini mengakibatkan semakin banyaknya tunggakan-tunggakan pajak pada tahun berikutnya.

Tabel. V.5: Jawaban Respoden Dispenda Melakukan Pemanggilan Terhadap Wajib Pajak Yang Enggan Melunasi Kewajiban Pajak Sarang Burung Walet.

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sering	80	30%
2	Sering	41	16%
3	Cukup Sering	62	24%
4	Kurang Sering	80	30%
5	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		263	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.5. di atas Jawaban Respoden Dispenda melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak yang enggan melunasi kewajibannya, dapat dilihat bahwa dari 263 orang responden yang ditemui oleh peneliti, 80 orang responden (30%) mengatakan sangat sering, hal ini dikarenakan menurut responden Dispenda melakukan pemanggilan kepada wajib pajak untuk mengingatkan kewajiban pajak yang belum dibayar hal ini dilakukan sebelum ditindak lanjuti secara hukum. Sedangkan 80 orang responden (30%) mengatakan kurang sering adalah dikarenakan menurut responden jarang dipanggil Dispenda atas permasalahan tunggakan pajak responden ini termasuk yang proaktif terhadap pelaksanaan Perda ini.

Pemanggilan wajib pajak yang enggan membayar biasa dilakukan bila telah terjadi penunggakan selama beberapa priode pajak tujuan dari pemanggilan untuk meminta penjelasan atas penangkaran sarang burung walet yang dimiliki.

Tabel. V.6: Jawaban Respoden tentang Peran UPTD Dalam Mengoptimalkan Pendataan Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Wilayah Kecamatan Kerjanya

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sering	50	19%
2	Sering	56	21%
3	Cukup Sering	95	36%
4	Kurang Sering	62	24%
5	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		263	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.6. di atas Jawaban Respoden tentang peran UPTD dalam mengoptimalkan pendataan wajib pajak di wilayah kerjanya, dapat dilihat bahwa dari 263 orang responden yang ditemui oleh peneliti 50 orang responden (19%) mengatakan sangat sering, hal ini dikarenakan menurut responden masyarakat terbantu dengan adanya UPTD di Kecamatan, pendataan terhadap objek pajak yang ada lebih optimal mengingat wilayah kerja yang tidak terlalu luas begitu juga dengan permasalahan objek pajak mereka dapat memberitahukan kepada UPTD. Sedangkan 62 orang responden (24%) mengatakan kurang sering adalah dikarenakan menurut responden masih terdapat beberapa objek pajak yang belum terdata dan belum memiliki ketetapan, akibatnya masyarakat yang lain merasa dirugikan atas pajak yang dibayar hal tersebut disebabkan adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Tanggapan Dispenda (ketua UPTD) mengenai permasalahan di atas, UPTD harus menjalankan tugas untuk melakukan pendataan, pemungutan, penyelenggaraan pembayaran pajak khususnya pajak sarang burung walet,

namun karena keterbatasan peralatan dan tenaga pada UPTD pelayanan yang diberikan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Tabel. V.7: Jawaban Responden Apakah Pendataan Yang Dilakukan Dispenda Sudah Cukup Memberikan Informasi Kepada Pemungut.

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sering	-	-
2	Sering	25	9%
3	Cukup Sering	33	13%
4	Kurang Sering	172	65%
5	Tidak Pernah	33	13%
Jumlah		263	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.7. di atas Jawaban Responden apakah pendataan yang dilakukan memberikan informasi yang cukup bagi petugas pemungutan, dapat dilihat bahwa dari 263 orang responden yang ditemui oleh peneliti, 25 orang responden (9%) mengatakan sering, hal ini dikarenakan menurut responden petugas melakukan pemungutan dengan baik, dengan menggunakan data yang dikumpulkan saat pendataan walaupun masih banyak juga subjek pajak yang keberadaannya belum diketahui dan harus ditanyakan kepada masyarakat yang lain. Sedangkan 33 orang responden (13%) mengatakan tidak pernah adalah dikarenakan menurut responden petugas masih sering mengalami kebingungan hal ini dapat dilihat petugas sering bertanya kepada masyarakat mengenai alamat subjek pajak yang dimaksud.

Tanggapan Dispenda mengenai permasalahan di atas, Dispenda dalam hal ini bidang pendataan mengakui adanya petugas yang kebingungan pada saat melakukan pemungutan disebabkan subjek pajak tidak bertempat tinggal dimana objek pajak berada, hal itu di sebabkan Dispenda masih menggunakan

blanko pendataan model lama yang tidak menyertakan alamat subjek pajak. Namun hal ini akan dilakukan pendataan ulang sehingga kekurangan pada pendataan sebelumnya akan diperbaiki pada pendataan yang dijadwalkan pada tahun 2010.

Tabel. V.8: Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Indikator Pendataan Sarang Burung Walet Di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator Pertanyaan	KATEGORI				
		Sangat sering	Sering	Cukup sering	Kurang sering	Tidak pernah
		Fr	Fr	Fr	Fr	Fr
1	Mengenai sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2008 tentang pajak sarang burung walet	105	60	29	69	-
2	Apakah Petugas Sering Menerima dengan baik Masukan Dari Masyarakat Pada Saat Melakukan Pendataan.	-	66	20	108	69
3	Mengenai pemanggilan terhadap wajib pajak yang enggan mebayar pajak	80	42	33	80	-
4	Mengenai peran UPTD dalam pelaksanaan pendataan wajib pajak di kecamatan secara optimal	50	56	95	62	-
5	Mengenai Pendataan Yang Dilakukan Dispenda Sudah Cukup Memberikan Informasi Kepada Pemungut	-	25	33	172	33
Jumlah		235	248	239	491	102
Pesentase		18	19	18	37	8

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Tabel V.8. di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan Responden masyarakat memberikan jawaban tentang pendataan terhadap hasil penjualan

sarang burung walet diperoleh jawaban responden tertinggi 491 atau 37% dengan kategori kurang sering.

Pelaksanaan sosialisasi Peraturan dapat dengan pendekatan terhadap para penerima kebijakan, selain itu sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk nyata seperti dengan papan iklan, baliho ataupun spanduk yang berisi tentang seruan pelaksanaan suatu peraturan, jika sosialisasi dilakukn lewat media penyiaran khususnya siaran lokal dinilai kurang efektif hal ini disebabkan masyarakat lebih menyukai acara pada TV Nasional dibanding TV Daerah.

UPTD sebagai garda terdepan dari Dinas Pendapatan Harus lebih diperhatikan baik dalam kesejahteraannya maupun ketersediaan pegawai dalam UPTD itu sendiri sehingga dengan semakin memadainya sarana dan prasarana pada UPTD realisasi terget dapat lebih ditingkatkan dengan cara menggali potensi pajak sarang burung walet yang belum terdata.

Sudah seharusnya dilakukan pendataan ulang terhadap setiap penangkaran sarang burung walet dilakukan pendataan ulang sehingga tidak mebingungkan para juru pungut dalam melaksanakan pemungutan sehinga pemungutan dapat optimal.

2. Penghitungan dan Penetapan

Penghitungan nilai jual burung walet dimaksudkan untuk mengetahui jumlah penjualan yang dilakukan pengusaha atau masyarakat selama satu tahun priode pajak. Dalam Peraturan Daerah No 09 tahun 2008. Penghitungan dijelaskan pada pasal 3 sampai dengan pasal 5 sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual Sarang Burung Walet
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan banyaknya/besarnya Sarang Burung Walet yang dipanen dengan harga yang berlaku di pasaran sesuai dengan jenis masing-masing Sarang Burung Walet.

Pasal 4

Besarnya tarif Pajak ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan.

Pasal 5

Besarnya pajak yang terhutang adalah dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 3

Sedangkan penetapan dimaksudkan untuk membantu pengusaha atau masyarakat mengetahui tentang pajak sarang burung walet yang harus dibayar dalam Peraturan Daerah No 09 tahun 2008. Penetapan pajak sarang burung walet diatur pada pasal 10 sampai pasal 11 sebagai berikut:

Pasal 10

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya Bupati menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD melalui Instansi yang ditunjuk

Pasal 11

- (1) Bagi Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD digunakan untuk menghitung dan menetapkan nilai pajak yang terhutang

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah jatuh tempo terhutang pajak bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB
- b. SKPDKBT
- c. SKPDN

Pada penelitian ini, kegiatan penghitungan dan penetapan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Kabupaetn Indragiri Hilir. Untuk mengetahui kondisi lapangan melalui penyebaran angket yang diberikan kepada pengusaha walet yang dijadikan objek penelitian. Berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai Perhitungan dan Penetapan Pajak Sarang Burung Walet dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. V.9: Jawaban Responden Apakah Ketetapan Pajak Sarang Burung Walet Dilaksanakan Dengan Mempertimbangkan Nilai Pendapatan Masyarakat

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sering	85	32%
2	Sering	65	25%
3	Cukup Sering	47	18%
4	Kurang Sering	66	25%
5	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		263	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.9. di atas Jawaban Respoden Apakah ketetapan pajak sarang burung walet dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai pendapatan masyarakat, dapat dilihat bahwa dari 263 orang responden yang ditemui oleh peneliti, 85 orang responden (32%) mengatakan sangat sering, hal ini dikarenakan menurut responden melihat dari setiap ketetapan yang dibuat sering tidak memberatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima

ketetapan yang dibuat Dispenda. Sedangkan 66 orang responden (25%) mengatakan kurang sering adalah dikarenakan menurut responden masyarakat menilai petugas kurang paham tentang isi Peraturan Daerah No 09 Tahun 2008 ini sehingga ketetapan yang dibuat masih sering tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat dengan demikian masyarakat merasa dirugikan.

Tanggapan Dispenda tentang permasalahan diatas, penetapan pajak sarang burung walet harus sesuai dengan pendapatan pengusaha sebagaimana terdapat dalam pasal 3 ayat (2) yaitu, Nilai jual dihitung dengan mengalikan banyaknya sarang burung walet yang dipanen dengan harga pasaran umum yang berlaku di pasaran sesuai dengan jenis masing-masing sarang burung walet. (Perda No 09 Tahun 2008)

Tabel. V.10: Jawaban Respoden Apakah Ketentuan Pajak Sering Sesuai Dengan Harga Pasaran Umum (HPU)

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sering	58	22%
2	Sering	86	33%
3	Cukup Sering	47	18%
4	Kurang Sering	72	27%
5	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		257	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.10. di atas Jawaban Respoden apakah ketentuan pajak sering sesuai dengan Harga Pasaran Umum (HPU), dapat dilihat bahwa dari 263 orang responden yang ditemui oleh peneliti, 58 orang responden (22%) mengatakan sangat sering, hal ini dikarenakan menurut ketetapan yang dibuat oleh Dispenda telah sesuai dengan harga pasaran umum dimana ketika harga jual tinggi maka nilai pajak juga akan naik begitu juag ketika harga jual turun nilai pajak juga rendah. Sedangkan 72 orang responden (27%) mengatakan

kurang sering adalah dikarenakan menurut responden masyarakat walaupun nilai pajak yang ditetapkan sudah sesuai dengan harga pasaran umum namun masih sering dijumpai nilai pajak yang ditetapkan terlalu tinggi padahal harga jual rendah.

Tanggapan Dispenda, penetapan pajak sebagaimana pada pasal 5 adalah sebagai berikut nilai "pajak yang terhutang adalah dengan cara mengalikan tarif pajak (10%) dengan nilai jual sarang burung walet berdasarkan jenis masing-masing, namun jika terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan pajak dengan Harga Pasaran Umum (HPU) hal tersebut adalah kesalahan dalam penetapan, dapat dibetulkan sebagaimana di atur dalam pasal 18

Tabel. V.11: Jawaban Respoden Petugas Apakah Dispenda Melakukan Sosialisasi Ketentuan Pajak Sarang Burung Walet Kepada Wajib Pajak.

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sering	-	-
2	Sering	102	39%
3	Cukup Sering	69	26%
4	Kurang Sering	66	25%
5	Tidak Pernah	26	10%
Jumlah		263	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.11. di atas Jawaban Respoden tentang apakah dispenda melakukan sosialisasi ketentuan pajak sarang burung walet kepada Dispenda, dapat dilihat bahwa dari 263 orang responden yang ditemui oleh peneliti, 102 orang responden (39%) mengatakan sering, hal ini dikarenakan menurut responden masyarakat sering menerima sosialisasi ketentuan dari petugas, hal ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya keberatan atas ketentuan pajak yang dibuat. Sedangkan 26 orang responden (10%) mengatakan tidak pernah

adalah dikarenakan menurut responden masyarakat tidak diberitahu tentang ketentuan pajak yang dibuat, akibatnya sering terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang dibuat.

Tabel. V.12: Jawaban Respoden Apakah Masyarakat Dalam Melaksanakan Penen Sarang Burung Walet Melaporkan Hasil Panen Kepada Dispenda

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sering	-	-
2	Sering	81	31%
3	Cukup Sering	51	19%
4	Kurang Sering	54	21%
5	Tidak Pernah	77	29%
Jumlah		263	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.12. di atas Jawaban Respoden Apakah masyarakat dalam melaksanakan panen sarang burung walet melaporkan hasil panen kepada Dispenda, dapat dilihat bahwa dari 263 orang responden yang ditemui oleh peneliti, 81 orang responden (31%) mengatakan sering, hal ini dikarenakan menurut responden melaporkan hasil panen sarang burung walet telah diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah No 09 Tahun 2008 tentang pajak sarang burung walet. Sedangkan 77 orang responden (29%) mengatakan tidak pernah adalah dikarenakan menurut responden lemahnya pengawasan dari pemerintah sehingga pemerintah juga tidak tahu kapan waktunya panen dilaksanakan.

Tanggapan Dispenda Bidang pendataan, Dispenda mengakui tidak dapat memprediksi waktu pengusaha melaksanakan panen sarang burung walet selain itu pengusaha tidak melaporkan waktu panen dan hasil panen segera setelah panen dilaksanakan. Untuk itu Dispenda akan membentuk sebuah tim

yang mengawasi aktifitas panen penangkaran sarang burung walet dengan melakukan pendekatan secara persuasif .

Tabel. V.13: Jawaban Respoden Apakah Dispenda Pernah Melakukan Kesalahan Dalam Panetapan Pajak Sarang Burung Walet Sehingga Merugikan Wajib Pajak

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sering	-	-
2	Sering	81	31%
3	Cukup Sering	108	41%
4	Kurang Sering	74	28%
5	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		263	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.13. di atas jawaban responden masyarakat apakah dispenda pernah melakukan kesalahan dalam membuat ketetapan pajak sarang burung walet yang dapat merugikan wajib pajak, dapat dilihat bahwa dari 263 orang responden yang ditemui oleh peneliti, 81 orang responden (31%) mengatakan sering, karena masih sering terjadi kesalahan yang dapat merugikan wajib pajak misalnya, kesalahan dalam membuat ketetapan yang tidak sesuai dengan hasil penjualan sarang burung walet. Sedangkan 74 orang responden (28%) mengatakan tidak pernah adalah dikarenakan menurut responden walaupun terdapat permasalahan namun tidak semuanya bermasalah namun tetap harus mendapat perhatian dan dibutuhkan kejelian dalam menetapkan suatu nilai pajak.

Tanggapan Dispenda mengenai permasalahan diatas, jika terjadi kesalahan dalam penetapan atau kesalahan tulis pajak sarang burung walet, SKPD dapat diperbaiki sebagaimana diatur dalam pasal 18 Perda No 09 Tahun 2008 sebelum pajak tersebut dibayar sehingga tidak merugikan wajib pajak.

Tabel. V.14: Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Indikator Perhitungan dan Penetapan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator Pertanyaan	Persentase %				
		Sangat sering	Sering	Cukup sering	Kurang sering	Tidak pernah
		Fr	Fr	Fr	Fr	Fr
1	Mengenai penetapan sarang burung walet dengan memperhatikan pendapatan masyarakat	85	65	47	66	-
2	Menganai ketentuan pajak yang dibayar sesuai dengan harga pasaran umum (HPU)	58	86	47	72	-
3	Menganai Apakah Dispenda Melakukan Sosialisasi Ketetapan Pajak Sarang Burung Walet Kepada Wajib Pajak.	-	102	69	66	26
4	Mengenai apakah masyarakat dalam melaksanakan penen Sarang Burung Walet Melaporkan Hasil Panen Kepada Dispenda	-	81	51	54	77
5	Apakah Dispenda Pernah Melakukan Kesalahan Dalam Membuat Ketetapan Pajak Sarang Burung Walet Yang Dapat Merugikan Wajib Pajak	-	81	108	74	-
Jumlah		143	415	322	332	103
Persentase		11	32	24	25	8

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.14. di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan Responden masyarakat memberikan jawaban tentang perhitungan dan penetapan pajak sarang burung walet didapat jawaban responden tertinggi 415 atau 32% dengan kategori sering.

Pendekatan secara persuasif terhadap pengusaha walet harus dilakukan dengan baik sehingga dengan kesadaran wajib pajak itu sendiri melaporkan hasil panen pajak sarang burung walet kepada Dispenda, selain itu dengan

kesadaran wajib pajak melaporkan pada saat akan melakukan panen sehingga kecurangan dalam pelaporan hasil panen dapat diminimalkan.

Kesalahan penetapan dalam menetapkan pajak dapat diperbaiki sebagaimana di atur dalam pasal 18 Perda No 09 Tahun 2008, namun jika pajak tersebut telah dibayar maka kelebihan bayar dapat dikembalikan dengan cara diatur dalam pasal 22 ayat (1) Perda No 09 Tahun 2008 yang berbunyi “Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan Alamat Wajib pajak
- b. Masa Pajak
- c. Besarnya kelebihan pembayaran
- d. Alasan yang jelas”

3. Pemungutan dan Pembayaran

Pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan pada saat bersamaan dengan penyerahan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada saat itulah petugas melaksanakan pemungutan namun tidak harus dibayar pada saat itu juga bisa dibayar setelah beberapa hari setelah penyerahan SKPD dengan cara wajib pajak datang ke loket pembayaran atau langsung ke kas Daerah atau bisa juga pembayaran dilakukan di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

Sedangkan pemabayaran lebih lanjut dijelaskan pada pasal 12 sampai pasal 16 Peraturan Daerah No 09 Tahun 2008 sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Umum Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT dan STPD
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Bendahara Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak yang terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan tambahan pembayaran 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas yang ditentukan sesuai persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan tambahan pembayaran 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar

- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4) pasal ini diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, serta ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan sebagaimana di atur pada ayat (1) di atur dengan peraturan bupati

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau lainnya yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dalam surat teguran atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan cara paksa

- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis
- (3) Bentuk, jenis, isi, serta formulir dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditentukan dengan peraturan bupati.

Untuk mengetahui Jawaban Respoden tentang Pemungutan dan pembayaran dapat dilihat jawaban masyarakat berdasarkan pertanyaan yang ada pada angket yang telah dibagikan. Berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai Pemungutan dan Pembayaran pajak sarang burung walet dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. V15. : Jawaban Respoden Apakah Dispenda Membaerikan Pemahaman Tentang Sistem Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sering	78	30%
2	Sering	63	24%
3	Cukup Sering	103	39%
4	Kurang Sering	19	7%
5	Tidak Pernah	-	-
Jumlah		263	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.15. di atas Jawaban Respoden apakah Dispenda sering memberikan pemahaman tentang sistem pembayaran pajak sarang burung walet, dapat dilihat bahwa dari 263 orang responden yang ditemui oleh peneliti, 78 orang responden (30%) mengatakan sangat sering, hal ini dikarenakan menurut responden masyarakat telah banyak yang mengetahui tentang sistem pembayaran pajak sarang burung walet hal ini disebabkan adanya pemberian pemahaman oleh Dispenda apalagi dengan adanya UPTD di kecamatan yang dapat melayani pembayaran pajak sarang burung walet ini.

Sedangkan 19 orang responden (7%) mengatakan kurang sering adalah dikarenakan menurut responden masih terdapat masyarakat yang kebingungan pada saat akan melaksanakan pembayaran pajak sarang burung walet.

Tabel. V16. : Jawaban Respoden Peran Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Di Kecamatan Membantu Pelaksaaan Pemabayaran Pajak.

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sering	81	31%
2	Sering	23	9%
3	Cukup Sering	-	-
4	Kurang Sering	85	32%
5	Tidak Pernah	74	28%
Jumlah		263	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.16. di atas Jawaban Respoden tentang peran UPTD di kecamatan dalam membantu pembayaran pajak sarang burung walet, dapat dilihat bahwa dari 263 orang responden yang ditemui oleh peneliti, 81 orang responden (31%) mengatakan sangat sering, hal ini dikarenakan menurut responden dengan adanya pemberian pemahaman tentang sistem pembayaran pajak hasilnya banyak wajib pajak yang membayar pajak sarang burung walet di UPTD sehingga pembayaran tidak harus ke Dinas Pendapatan, dengan demikian UPTD di kecamatan sangat berperan membantu wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan 74 orang responden (28%) mengatakan Tidak Pernah adalah dikarenakan menurut responden pemberian pemahaman tentang sistem pembayaran telah diterima namun penyelenggaraan pembayaran pajak di UPTD belum dapat dilaksanakan secara merata sehingga wajib pajak merasa tidak terbantu dengan adanya UPTD di Kecamatan karena keterbatasan Pegawai pelayanan pembayaran pajak di UPTD.

Tanggapan Dispenda (ketua UPTD) pembayaran Pajak juaug dapat dilakukan di UPTD, namun pelaksanaan pembayaran pajak di UPTD belum dapat dilaksanakan di setiap UPTD hal tersebut disebabkan kurang pegawai UPTD sehingga pelaksanaan pembayaran harus dilaksanakan di kas daerah (loket pembayaran pada Dinas Penadapatan)

Tabel. V.17: Jawaban Respoden Apakah Dispenda Melakukan Penyitaan Terhadap Tempat Usaha Penangkaran Sarang Burung Yang Tidak Mau Mebayar Pajak.

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sering	-	-
2	Sering	-	-
3	Cukup Sering	24	9%
4	Kurang Sering	111	42%
5	Tidak Pernah	128	49%
Jumlah		263	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.17. di atas Jawaban Respoden apakah Dispenda pernah melakukan penyitaan terhadap tempat usaha penangkaran sarang burung walet yang tidak membayar pajak, dapat dilihat bahwa dari 263 orang responden yang ditemui oleh peneliti, 24 orang responden (9%) mengatakan cukup sering, hal ini dikarenakan menurut responden pernah melihat prosesi dalam melaksanakan penyitaan tempat usaha yang tidak mau membayar pajak namun hal ini belumlah cukup untuk meningkatkan realisasi dari target pajak sarang burung walet. Sedangkan 128 orang responden (49%) mengatakan Tidak pernah adalah dikarenakan menurut responden tidak pernah melihat adanya tindakan dari Pemda ketika terdapat tempat penangkaran yang tidak mau membayar pajak, untuk itu pemerintah dinilai lemah dalam menerapkan Peraturan Daerah No 09 Tahun 2008 tentang pajak sarang burung walet ini.

Hal diatas sejalan dengan apa yang dituturkan oleh seksi Retribusi dan PAD lainnya, sepengetahuan saya Dispenda belum pernah melakukan penyitaan terhadap tempat usaha yang tidak mebayar pajak, Dispenda hanya mengenakan sanksi sebesar 2% itu saja. Namun jika pernah terjadi Penyitaan itu dulu sebelum saya bertugas di Dispenda.

Tabel. V.18: Jawaban Respoden Apakah Dispenda Meberikan Sanksi Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sering	74	28%
2	Sering	58	22%
3	Cukup Sering	28	11%
4	Kurang Sering	46	17%
5	Tidak Pernah	57	22%
Jumlah		263	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.18. di atas Jawaban Respoden apakah Dispenda memberikan sanksi terhadap keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, dapat dilihat bahwa dari 263 orang responden yang ditemui oleh peneliti, 74 orang responden (28%) mengatakan sangat sering, hal ini dikarenakan menurut responden setiap keterlambatan pembayaran pajak sarang burung walet Dispenda memberikan sanksi sebesar 2% dari jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan 57 orang responden (22%) mengatakan Tidak pernah adalah dikarenakan menurut responden hal ini disebabkan responden selalu membayar pajak sebelum jatuh tempo sehingga tidak pernah dikenakan sanksi.

Tanggapan Dispenda, Dalam pelaksanaan pembayaran pihak pengusaha burung walet diberikan batas waktu sampai tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Namun apabila pembayaran tersebut terlambat, maka akan dikenakan sanksi Administrasi (denda) sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya.

Tabel. V.19: Jawaban Respoden Apakah Dispenda Memberikan Penghargaan Terhadap Wajib Pajak Yang Taat Dengan Pajak Dan Membayar Sebelum Jatuh Tempo.

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Sering	-	-
2	Sering	74	28%
3	Cukup Sering	68	26%
4	Kurang Sering	76	29%
5	Tidak Pernah	45	17%
Jumlah		263	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.19. di atas Jawaban Respoden tentang Dispenda memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang selalu membayar pajak sebelum jatuh tempo, dapat dilihat bahwa dari 263 orang responden yang ditemui oleh peneliti, 74 orang responden (28%) mengatakan sering, hal ini dikarenakan menurut responden Dispenda memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang selalu membayar pajak tepat pada waktunya selama 5 tahun periode pajak penghargaan tersebut berupa piagam penghargaan, namun pemberian penghargaan ini tidak dapat berlanjut secara terus menerus sampai sekarang, pemberian penghargaan ini hanya bejalan 2 periode saja sedangkan sekarang tidak ada lagi. Sedangkan 45 orang responden (17%) mengatakan Tidak pernah adalah dikarenakan menurut responden pemberian penghargaan tidak dapat dilaksanakan hal ini menurut wajib pajak yang baru berusaha selaman

1- 5 tahun sehingga mereka belum pernah mendapatkan penghargaan atas pajak yang telah dibayar, seharusnya pemberian penghargaan ini dapat dilaksanakan secara kontinu untuk menimbulkan kompetisi bagi wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dengan adanya kompetisi demi memperoleh pengurangan wajib pajak belom-bela melunasi kewajiban pajaknya sebelum jatuh tempo. Dengan demikian Target pajak sarang burung walet dapat Terealisasi dengan maksimal.

Tabel. V.20: Rekapitulasi Jawaban Respoden Mengenai Indikator Pemungutan dan pembayaran Sarang Burung Walet Di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator Pertanyaan	Persentase %				
		Sangat sering	Sering	Cukup sering	Kurang sering	Tidak pernah
		Fr	Fr	Fr	Fr	Fr
1	Mengenai dispenda memberikan pemahaman sistem pembayaran pajak kepada masyarakat	78	63	103	19	-
2	Mengenai keberadaan UPTD di kecamatan membantu pembayaran pajak secara optimal.	81	23	-	85	74
3	Mengenai Dispenda melakukan penyitaan terhadap tempat usaha yang tidak mau membayar pajak	-	-	24	111	128
4	Mengenai dispenda memberikan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak	74	58	28	46	57
5	Mengenai dispenda memberikan penghargaan terhadap wajib pajak yang taat pajak	-	74	68	76	45
Jumlah		233	218	223	337	304
Persentase		18	17	17	25	23

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2010

Dari tabel V.20. di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan Responden masyarakat memberikan jawaban tentang pembayaran dan penagihan pajak sarang burung walet diperoleh jawaban responden tertinggi 337 atau 25% dengan kategori kurang sering.

Peran UPTD sebagai garda terdepan dari Dinas Pendapatan harus lebih diperhatikan baik dalam kesejahteraan maupun ketersediaan pegawai dalam UPTD itu sendiri sehingga dengan semakin memedainya sarana dan prasarana pada UPTD realisasi terget dapat lebih dengan peayanan pembayaran pada UPTD itu sendiri akan memudahkan para wajib pajak mwmbayar kewajiban pajak mereka tanpa harus menghabiskan waktu yang cukup banyak.

Sikap Dispenda harus tegas terhadap wajib pajak yang enggan membayar pajak samapi batas kadaluarsa penagihan sebagaimana pada pasal 23 ayat (1) Yang berbunyi “Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadarlaursa setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah”

Ayat (2) “ kadaluarsa penagihan pajak Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditangguh apabila:

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
- b. Adanya pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung”

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pendataan Terhadap Hasil Penjualan Sarang Burung Walet dalam Implementasi Peraturan Daerah No 09 Tahun 2008 yang dilakukan oleh pihak Dispenda, diperoleh jawaban responden tertinggi 491 atau 37% dengan kategori kurang sering. Hal ini dikarenakan hasil pendataan belum dapat membantu petugas pemungutan secara menyeluruh.
2. Penghitungan dan Penetapan dalam Implementasi Peraturan Daerah No 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, didapat jawaban responden tertinggi 415 atau 32% dengan kategori sering. Hal ini dikarenakan dalam penetapan dan perhitungan berdasarkan Perda No 09 Tahun 2008 dimana pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak (10%) dengan banyaknya sarang burung walet yang dipanen kemudian dikalikan dengan harga pasaran yang berlaku dipasaran berdasarkan jenis masing-masing sarang burung walet
3. Pemungutan dan Pembayaran dalam Implementasi Peraturan Daerah No 09 Tahun 2008 tentang pajak sarang burung walet, diperoleh jawaban responden tertinggi 337 atau 25% dengan kategori kurang sering, karena masih terdapat tunggakan setiap tahunnya dalam pelaksanaan pemungutan

pajak sarang burung walet, sedangkan dalam pelaksanaan pembayaran pada UPTD tidak semua UPTD dapat melayani disebabkan kurangnya petugas pada UPTD tersebut.

Menurut penilaian dalam penelitian ini Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet tersebut dapat dikatakan belum terlaksana sepenuhnya dengan baik, hal ini dikarenakan secara garis besar pengetahuan tentang Peraturan Daerah (PERDA) tersebut masyarakat banyak yang tidak mengetahui dan tidak paham tentang Peraturan Daerah tersebut, sedangkan tingkat keseriusan Instansi dari Dinas Pendapatan dalam menjalankan kewajiban belum berjalan secara maksimal.

6.2. Saran.

Saran yang peneliti berikan sebagai masukan dalam Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) No 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1. Peraturan Daerah ini harus sering disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun lewat iklan, baliho, papan nama, dan lain-lain sehingga masyarakat paham dan mematuhi Peraturan Daerah dan membayar pajak tepat pada waktunya.
2. Dalam pelaksanaan pendataan harus diterakan alamat subjek pajak karena wajib pajak yang memiliki objek pajak lebih dari satu tempat cenderung untuk menyewakan gedung tersebut sebagai Ruko dan pemilik tinggal

ditempat lain sehingga juru pungut tidak menjadi bingung dalam melaksanakan pemungutan.

3. Dispenda membentuk TIM Pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi setiap kegiatan panen yang dilakukan oleh pengusaha maupun masyarakat, dengan demikian tim pengawas mengetahui secara langsung penghasilan dalam setiap panen yang dilakukan.
4. Dalam melakukan sosialisasi Dispenda harus memberikan pemahaman tentang tatacara perhitungan sehingga masyarakat tidak merasa keberatan atas ketentuan yang telah ditetapkan, selain itu masyarakat memiliki taksiran tentang pajak yang harus dibayar jika mereka paham tentang tatacara menghitung besar pajak yang dibayar.
5. Dispenda harus lebih teliti dalam menetapkan pajak sehingga tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
6. Pemerintah atau Dispenda harus menerapkan Peraturan Daerah ini secara menyeluruh termasuk wajib pajak yang enggan membayar pajak hingga batas waktu 5 tahun harus dilakukan penyitaan terhadap tempat usaha mereka sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, selain itu Pajak Sarang Burung Walet bersifat pajak bukan retribusi sehingga dapat dipaksakan.
7. dalam Implementasi ini hendaknya pengawai melakukan pendekatan persuasive kepada wajib pajak sehingga mereka dengan senang hati membayar pajak sarang burung walet dengan senang hati, juga

meningkatkan kesadaran mereka tentang pajak ini merupakan kewajiban kita sebagai warga Negara yang baik.

8. Untuk lebih meningkatkan realisasi Dispenda dapat menerapkan pemberian penghargaan kepada setiap wajib pajak yang taat terhadap kewajiban pajak mereka dan membayar dalam setiap tahunnya sebelum jatuh tempo

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Faisal, 2008, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kab, Indragiri Hili*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR.
- Harahap, Azwar2008, *Keuangan Negara*, UIN SUSKA PERS PEKANBARU-RIAU.
- Ismawan, Indra, 2001, *Memahami Reformasi Perpajakan*, PT.Gramedia, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan,2003, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara,Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2008, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- N. Dunn,William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Pres, Bandung.
- Nogi S. Hessel, 2005, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Parsons, Wayne, 2006, *Public Policy (pengantar teori dan praktik analisis kebijakan)* kencana, Jakarta.
- Syafii, Inu Kencana, 2006, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Syafi'i, Inu Kencana, 2007, *Manajemen Pemerintahan*, PT. Perca, Jakarta.
- Sugiyono, 2007, *Motodologi Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung
- Thoha, Miftah, 2005, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Umar, Husain, 2004, *Metode Riset Ilmu Administrasi (Ilmu Administrasi Negara, Pembangunan, dan Niaga)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Wahab, Abdul S, 1990, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Dokumentasi

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lengkap Pajak Daerah dan retribusi Daerah 2010. Fokus Media, Bandung

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Angket penelitian.....	93
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah penangkaran sarang burung walet se-Kabupaten Indragiri Hilir.....	6
Tabel I.2	Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Indragiri Hilir dari sektor Pajak Sarang Burung Walet	10
Tabel IV.1	Jarak Ibukota dengan kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir	44
Tabel IV.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri hilir dilihat dari golongan	52
Tabel IV.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri hilir dilihat dari tingkat pendidikan	53
Tabel IV.4	Gambaran penempatan tenaga Non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir	54
Tabel V.1	Identitas responden berdasarkan tingkat usia	57
Tabel V.2	Responden berdasarkan tingkat pendidikan	58
Tabel V.3	Jawaban responden sosialisasi No 09 tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.....	63
Tabel V.4	Jawaban responden Apakah petugas sering menerima dengan baik masukan dari masyarakat saat melakukan pendataan.....	64
Tabel V.5	Jawaban responden Apakah Dispenda melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak yang enggan melunasi kewajiban pajak sarang burung walet	65
Tabel V.6	Jawaban responden masyarakat tentang peran UPTD di Kecamatan dalam mengoptimalkan pendataan terhadap wajib pajak di wilayah kerjanya.....	66
Tabel V.7	Jawaban responden pendataan sering memberikan informasi kepada pemungut	67

Tabel V.8	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Indikator Pendataan Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir.....	68
Tabel V.9	Jawaban Responden Penetapan Pajak Dengan Mempertimbangkan Pendapatan Masyarakat	71
Tabel V.10	Jawaban Responden Ketentuan Pajak Yang Dibayar Sesuai Dengan Harga Pasaran Umum (HPU).....	72
Tabel V.11	Jawaban Responden Petugas petugas Dispenda melakukan sosialisasi ketetapan pajak sarang burung walet kepada wajib pajak	73
Tabel V.12	Jawaban Responden Apakah dalam melaksanakan panen sarang burung walet melaporkan hasil panen kepada Dispenda	74
Tabel V.13	Jawaban Responden Dispenda Melakukan Kesalahan Dalam Penetapan Pajak Sarang Burung Walet.....	75
Tabel V.14	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Indikator Perhitungan dan Penetapan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Indragiri Hilir	76
Tabel V.15	Jawaban Responden Dispenda Memberikan Pemahaman Tentang Sistem Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet	80
Tabel V.16	Jawaban Responden UPTD di Kecamatan Membantu Wajib Pajak Membayar Pajak	81
Tabel V.17	Jawaban Responden Dispenda Melakukan Penyitaan Terhadap Tempat Usaha Penangkaran Yang Tidak Mau Membayar Pajak ...	82
Tabel V.18	Jawaban Responden Dispenda Memberikan Sanksi Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak	83
Tabel V.19	Jawaban Responden Dispenda Memberikan Penghargaan Kepada Wajib Pajak Yang Taat Pajak.....	84
Tabel V.20	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Indikator Pemungutan dan pembayaran Sarang Burung Walet Di Kabupaten Indragiri Hilir	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1: Mekanisme Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten

Indragiri Hilir 9

Gambar IV.1: Struktur organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri

Hilir..... 49



***IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH(PERDA)
NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR***

Peneliti:
RIZAL ALI NURDIN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Angket Penelitian: Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 09 Tahun 2008 U
Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan Hormat.

Bapak/Ibu yang terhormat, mohon kesediaan dan kerjasamanya untuk mengisi angket penelitian ini

Dibawah ini ada sejumlah pertanyaan yang semuanya bertujuan untuk mengetahui *Implementasi Perda No 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet*, yang dilihat melalui Pendataan, Tatacara Perhitungan dan Penetapan, dan Pembayaran. Di Kabupaten Indragiri Hilir

Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak berpengaruh apapun terhadap status dan kedudukan Bapak/Ibu karena kerahasiaan jawaban tetap saya jaga. Ketepatan dan keakuratan hasil penelitian ini sangat tergantung pada jawaban yang Bapak/Ibu berikan, oleh karena itu saya mohon agar jawaban yang di berikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terimakasih.

I. Petunjuk Pengisian

Adapun cara pengisian angket sebagai berikut :

1. Angket ini bertujuan untuk melakukan penelitian ilmiah.
2. Berilah tanda centang (\checkmark) pada Kolom jawaban yang telah disediakan terdiri dari : **Sangat sering (SS), Sering (S), Cukup sering (CS), Kurang sering (KR) Tidak Pernah (TP).**
3. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan jawaban anda.
4. Apabila anda mengalami kesalahan memberi tanda centang (\checkmark) cukup beri tanda silang (x) pada kolom yang salah, kemudian beri tanda centang (\checkmark) pada kolom yang anda inginkan.

II. Identitas Responden

Jenis kelamin	:	a. Laki-laki	b. Perempuan
Pekerjaan	:	
Usia	:	a. < 17 tahun	b. > 17 tahun
Pendidikan	:	
Penghasilan	:	

III. Daftar Pertanyaan

A. Pendataan

No	Pertanyaan	Kolom Jawaban				
		SS	S	CS	KS	TP
1	Apakah Dispenda memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang PERDA No. 09 tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.					
2	Apakah petugas sering menerima masukan dari masyarakat saat melakukan pendataan					
3	Apakah DISPENDA melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak yang enggan melunasi kewajiban Pajak Sarang Burung Walet					
4	Apakah UPTD berperan dalam mengoptimalkan pendataan wajib pajak sarang burung walet di Wilayah kecamatan kerjanya					
5	Apakah pendataan yang dilakukan petugas sudah memberikan informasi yang cukup kepada juru pungut					

B. Perhitungan dan Penetapan

No	Pertanyaan	Kolom Jawaban				
		SS	S	CS	KS	TP
1	Apakah penetapan pajak sarang burung walet sering dilaksanakan dengan melihat nilai pendapatan masyarakat					
2	Apakah Ketentuan pajak yang dibayar sering sesuai dengan Harga Pasaran Umum (HPU)					
3	Apakah DISPENDA melakukan sosialisasi ketentuan pajak sarang burung walet kepada wajib pajak					
4	Apakah masyarakat dalam melaksanakan panen sarang burung walet melaporkan hasil panen kepada DISPENDA					
5	Apakah DISPENDA (petugas) pernah melakukan kesalahan dalam membuat ketentuan pajak sarang burung walet yang dapat merugikan wajib pajak					

C. Pembayaran

1	Apakah Dispenda sering memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem pembayaran Pajak Sarang Burung Walet					
2	Apakah keberadaan UPTD di kecamatan sering membantu pengusaha dalam pembayaran Pajak Sarang Burung Walet secara optimal					
3	Apakah DISPENDA pernah melakukan penyitaan terhadap pengusaha/badan yang tidak mau membayar kewajiban pajak yang di tetapkan					
4	Apakah Dispenda sering memberikan sanksi terhadap keterlamabatan yang dilakukan oleh masyarakat.					
5	Apakah Dispenda sering memberikan penghargaan bapak Bapak/Ibu yang membayar pajak seelu tepat waktu.					